

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan kebijakan bukan teknis, karena dalam hal ini DPRD tidak dapat menegakan serta menindak atas pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan atau peraturan daerah. Dalam hal ini yang berhak serta memiliki wewenang atas penegak dan penindak ialah lembaga yang memiliki kewenangan atas hal tersebut, yakni Satpol-PP. Sedangkan untuk DPRD hanya berperan sebagai pengawas kebijakan yang nantinya akan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut untuk dikaji kembali terkait kebijakan yang diawasa dapat berjalan maksimal atau tidak.
2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan kendala yang dihadapi dipengaruhi oleh faktor akar masalahnya internal, juga faktor eksternal yang turut menjadi permasalahan pada pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok, faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh dari faktor internal, ialah beberapa faktor kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan aturan larangan merokok ini:
 - a. Kurang mengetahuinya bahwa ada aturan Kawasan Tanpa Rokok.
 - b. Merasa bebasnya bagi pelanggar aturan
 - c. Rokok masih diminati masyarakat Kabupaten Kuningan.

Oleh karena itu DPRD Kabupaten Kuningan dituntut untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak menjadi akar permasalahan-permasalahan yang baru. Adapun beberapa langkah yang seharusnya dapat membantu menyelesaikan kendala ini diantaranya :

- a. Selalu melakukan evaluasi kerja
- b. Didukung dengan sumber daya manusia yang baik.
- c. Didukung dengan sarana dan prasarana

- d. Kerjasama dengan lembaga terkait, lembaga yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan peraturan daerah
3. Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan tentu halnya DPRD memiliki hubungan dengan Kepala Daerah serta Pemerintah Daerah, baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada ataupun dalam kegiatan kerja lainnya. Adapun hubungan DPRD Kabupaten Kuningan dengan Kepala Daerah khususnya lembaga pemerintahan yang terkait dalam pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok lembaga terkait, yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan peraturan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam hal ini Satpol PP memiliki kewenangan sebagai pelaksana dan juga penindak. Selain kerjasama yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kuningan dengan Satpol PP, DPRD Kabupaten Kuningan juga dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Kesehatan hal ini dapat difokuskan terhadap layanan kesehatan masyarakat serta dapat membantu mensosialisasikan terkait aspek kesehatan.
4. Fiqih siyasah ialah disiplin ilmu mengenai peraturan terhadap kemaslahatan umat baik dapat berupa produk hukum perundang-undangan maupun kebijakan pemerintahan dengan tujuan kemaslahatan umat. Dewan Perwakilan Rakyat dan *Fiqih siyasah* memiliki keterkaitan karena dalam pembahasan *Fiqih Siyasah* terdapat beberapa bidang, seperti *Siyasah Dusturiyah* dan *Siyasah Tasryi'iyah*. Bila *Siyasah Dusturiyah* ialah *Siyasah* dibidang peraturan dasar bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara dan juga hubungan pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan *Siyasah Tasryi'iyah* ialah *Siyasah* dalam bidang penepatan peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Begitu hal nya dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* atau sebagai wakil rakyat yang diberikan wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintah demi terciptanya kemaslahatan. Dalam *ahl al-hall wa al-'aqd* mereka juga diberi wewenang untuk memilih khalifah, menurunkan khalifah, dan kewenangan lainnya terkait dengan legislatif. *ahl al-hall wa al-'aqd* memiliki tugas lainnya yakni sebagai

lembaga pengawas terhadap jalannya pemerintahan dan juga mewakili umat dengan tujuan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat dicegah. Dalam pelaksanaannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* lembaga ini juga memiliki hak angket yang mana dalam hak ini *ahl al-hall wa al-'aqd* berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah.

Meskipun demikian DPRD Kabupaten Kuningan memiliki prinsip yang sama dengan *fiqih siyasah* namun sebetulnya untuk pelaksanaan fungsi pengawasan ini masih jauh tingkatannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*, karena disini DPRD Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan terkait kurang efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok

B. Saran

1. Terhadap DPRD

Dalam penyelesaian masalah ini diharapkan DPRD Kabupaten Kuningan untuk sesegera mungkin dapat menyelesaikan permasalahan terkait kurang efektifnya pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ini, baik itu dengan melakukan evaluasi ulang ataupun dengan meningkatkan hubungan kerja sama dengan lembaga terkait. Selain dari pada itu peran Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat berjalan maksimal khususnya lembaga terkait atau Satpol-PP, karena dalam hal ini peran Satpol-PP terhadap pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok ini sangat berperan penting. Dengan ditingkatkan lagi kualitas kerja serta tegasnya penegakan hukum. Karena pada dasarnya pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini belum berjalan begitu maksimal, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi dari kesadaran tiap-tiap fungsi, kewajiban serta wewenang badan penyelenggara.

2. Terhadap masyarakat

Diharapkan masyarakat kabupaten kuningan menyadari dari efek buruk merokok baik untuk diri pribadi maupun orang lain, selain daripada itu diharapkan juga masyarakat kabupaten kuningan dapat menerima atas diberlakukannya peraturan Kawasan Tanpa Rokok guna terciptanya masyarakat sehat serta udara yang bersih, selain dari pada itu tingkat kesadaran diharapkan lebih baik lagi dari sebelumnya.

3. Terhadap peneliti selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wawasan, serta khazanah keilmuan yang baru bagi peneliti-peneliti lain ataupun masyarakat umum. Selain dari pada itu dengan adanya penelitian-penelitian permasalahan baru dapat menambah pengetahuan terkini terkait permasalahan yang sedang berlangsung di sekitar kita, dan semoga bagi peneliti serta peneliti lainnya yang akan memulai penelitian diberikan kemudahan serta pengolahan data yang maksimal untuk dapat disajikan dengan baik.

